BAB V

PENUTUP

A. Simpulan

Berdasarkan analisis yang telah peneliti utarakan dalam bab IV, maka dapat ditarik beberapa simpulan yaitu sebagai berikut:

1. Kinerja pelaksanaan fungsi Badan Permusyawaratan Desa (BPD) Cukan Lipai masih belum efektif disebabkan ketua BPD maupun anggota BPD yang lain kurang memahami arti keberadaan dan fungsi BPD yang sebenarnya bahwa selain menjadi mitra kerja pemerintah desa, BPD juga sekaligus menjadi pengawas bagi kinerja kepala desa, yang artinya dalam melaksanakan tugas-tugasnya BPD harus bersifat independen dan bebas dari campur tangan kepala desa. Tetapi pada kenyataannya, kepala desa maupun aparatur desa banyak mengambil peran di dalam kebijakan yang dikeluarkan oleh BPD. Terhadap fungsinya sebagai legislator desa dan penampung serta penyalur aspirasi masyarakat desa pun BPD belum melaksanakannya dengan maksimal, karena masih banyak keluhan-keluhan dari masyarakat yang belum diakomodir dengan baik. BPD Cukan Lipai dari awal juga tidak dipilih secara demokratis tetapi hanya melalui penunjukkan oleh kepala desa sehingga mengarah kepada perbuatan nepotisme. Ketika aparatur desa menyalahgunakan kekuasaan untuk mengambil alih tugasnya pun, BPD juga tidak dapat berbuat banyak karena terbatasi oleh ketidakbisaan BPD dalam menggunakan laptop. Sehingga dengan adanya hal ini, kehadiran BPD Cukan Lipai yang diharapkan dapat

berperan dalam mewujudkan aparatur desa yang bersih dari korupsi, kolusi dan nepotisme menjadi nihil, malah sebaliknya BPD terlibat langsung di dalam perbuatan-perbuatan terlarang tersebut.

2. Kendala yang dihadapi oleh BPD Cukan Lipai dalam pelaksanaan fungsinya untuk mewujudkan aparatur desa yang bersih dari korupsi, kolusi dan nepotisme ialah kurangnya penguasaan dalam bidang teknologi terkait pengetikan di laptop yang dibutuhkan untuk membuat laporan pertanggungjawaban dan tugas-tugas lain BPD. Selain dari tidak tersedianya sarana yang dapat mendukung, kendala ini juga disebabkan karena tidak ada pelatihan yang disediakan oleh pemerintah desa untuk BPD Cukan Lipai dalam rangka meningkatkan kualitas sumber daya manusia supaya kinerja yang dihasilkan lebih maksimal. Kendala dalam bidang teknologi ini juga menimbulkan kendala yang lain, yakni terbatasnya ruang gerak BPD karena tugas yang seharusnya dikerjakan oleh mereka menjadi diambil alih oleh aparat desa, sehingga memunculkan ketergantungan dan kehati-hatian BPD dalam bertindak yang dapat berpengaruh terhadap keindependenan BPD Cukan Lipai.

B. Saran

1. Pemerintah hendaknya memperhatikan dan mendukung perkembangan lembaga BPD baik melalui program khusus atau dengan pelatihan-pelatihan yang berkesinambungan agar dapat meningkatkan kualitas sumber daya BPD, sehingga BPD menjadi lebih kompeten di bidangnya serta lebih mengetahui

arti keberadaan dan fungsinya di masyarakat dalam rangka mewujudkan aparatur desa yang bersih dari korupsi, kolusi dan nepotisme.

2. Pemerintah diharapkan dapat memfasilitasi sarana dan prasarana bagi BPD, hal ini demi menunjang keberhasilan program khusus atau pelatihan-pelatihan yang telah diberikan serta mempermudah kegiatan dan perencanaan program-program oleh BPD, sekaligus dapat membuat kinerja dan fungsi BPD lebih efektif.